

# **DAMPAK TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**Selfesina Samadara<sup>1</sup>, Jennie S.Sir<sup>2</sup>, Moni J.Siahaan<sup>3</sup>**  
[selfisamadara@gmail.com](mailto:selfisamadara@gmail.com)<sup>1</sup>, [jenniesir678@gmail.com](mailto:jenniesir678@gmail.com)<sup>2</sup>, [monijuniati@gmail.com](mailto:monijuniati@gmail.com)<sup>3</sup>  
Politeknik Negeri Kupang

## **Abstrak**

Prinsip akuntabilitas sangat penting untuk dilaksanakan karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban kepada publik, baik segi hasil maupun segi finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan penilaian atas kinerja yang diperoleh. Akuntabilitas finansial melihat penggunaan dana secara efektif dan efisien serta tidaknya kebocoran dana tersebut. Dan juga bahwa prinsip akuntabilitas ini dianggap sangat menguntungkan apabila prinsip ini diterapkan untuk proses pengelolaan keuangan, terutama keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi-instansi pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak akuntabilitas dan transparansi dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Sampel penelitian ini adalah pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh SKPD Dinas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Metode analisa yang digunakan adalah model regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis secara parsial dengan uji t dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis secara simultan dengan uji F. Luaran dari penelitian ini berupa suatu kajian mengenai Dampak Transparansi, Akuntabilitas Dan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Informasi Akuntansi, APBD.

## **PENDAHULUAN**

Seluruh Propinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia dijadikan sebagai daerah otonomi oleh Pemerintah Pusat, dalam arti Pemerintah Pusat memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat masing masing Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Otonomi daerah berimplikasi pada pendelegasian kewenangan disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam rangka Desentralisasi Fiskal.

Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting dalam terlaksananya pembangunan di daerah. Untuk itu dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah seharusnya program pembangunan sudah dimuat dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah agar supaya program pembangunan

tersebut dapat di biayai dan dapat dilaksanakan, sehingga pembangunan dapat terarah dan di kontrol.

Anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah masih banyaknya ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan realisasi anggaran termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan opini atas LKPD berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).

Masalah yang menonjol dan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, dimulai penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan realisasi belanja dan pendapatan yang tidak akuntabel dan pertanggungjawaban yang tidak layak, yang pada akhirnya berimbas pada laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden dalam hal kegiatan pengadaan (Perpres 54 Tahun 2010 direvisi Perpres 70 Tahun 2012), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang milik daerah (permendagri ) dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah lainnya. Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah .

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak transparansi, akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah , secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan APBD. Penelitian ini penting dilakukan berkaitan dengan Akuntabilitas dimana publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan dalam hal ini Pemerintah. Pemerintah harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Dampak Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Desain Penelitian**

Berdasarkan karakteristik dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dari analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap pengelolaan APBD.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian dari penelitian ini adalah seluruh SKPD Dinas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang sudah diperbaharui dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD yaitu: (1) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, (2) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dan (5) Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Berangkat dari rincian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari penelitian [9]. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: pejabat yang menduduki posisi sebagai pelaksana pengelolaan APBD pada seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pejabat pengelola yang bersedia merespon kuisioner yang diberikan. Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin.

### 4. Metode Analisa Data

Metode Analisis Data yang digunakan meliputi uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Sedangkan model persamaan regresi penelitian ini yaitu:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$ , dimana:  $Y$  = Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja,  $X_1$  = akuntabilitas,  $X_2$  = Transparansi,  $X_3$  = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah,  $a$  = konstanta  $b_1, b_2$  = koefisien regresi.

### 5. Variabel dan Pengukuran Operasional Variabel Pengelolaan APBD (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pengelolaan APBD. Pengelolaan APBD meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.[4] Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala likert 1-5 poin. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan APBD adalah dengan menerapkan prinsip value for money.

#### Transparansi (X1)

Transparansi merupakan variabel independen pertama dalam penelitian ini. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengukur variabel transparansi digunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar.

#### Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas adalah variabel independen kedua dalam penelitian ini. Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengukur variabel akuntabilitas digunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar [8].

### Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X3)

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang SIKD menyebutkan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Dalam penelitian ini Responden yang digunakan adalah SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bagian keuangan dan akuntansi. Kuesioner yang dijadikan acuan pengolahan data berjumlah 105. Hasil analisis regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1. (Constant)	3.033	1.320	
Dampak			
Transparansi,	.183	.061	.174
Akuntabilitas	.117	.032	.138
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.365	.053	.378

1. Nilai konstanta sebesar 3,033 dapat diartikan apabila Transparansi, (X1), Akuntabilitas (X2), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X3), nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan, maka Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar 3,033.
6. 2. Nilai koefisien beta pada variabel Transparansi sebesar 0,183 artinya setiap perubahan variabel Transparansi (X1) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,183 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Transparansi akan meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 0,183 satuan.
2. Nilai koefisien beta pada variabel Akuntabilitas, 0,117 artinya setiap perubahan variabel Akuntabilitas (X2) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,117 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap.
3. Nilai koefisien beta pada variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X3), 0,365 artinya setiap perubahan variabel Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X3) sebesar satu satuan, maka akan mengakibatkan perubahan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Y) sebesar 0,365 satuan, sedangkan variabel independen lainnya dianggap konstan atau tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel Pemanfaatan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah akan meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

### **KESIMPULAN**

1. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip good governance, prinsip ini telah berjalan secara efektif pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini terlihat jelas dari adanya sosialisasi aparatur pemerintah kepada masyarakat terhadap kebijakan yang akan ditempuh.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dikarenakan laporan pertanggung jawaban peraturan maupun kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah sesuai dengan apa yang dilaporkan aparatur pemerintah tersebut.
3. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010. Data telah didokumentasikan, diadministrasikan, serta diolah data pengelolaan keuangan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan .

### **Daftar Pustaka**

- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2010. "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah." *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan 2* (1): 57–70.
- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, dan Brian Perrin. 2012. "Performance measurement in Indonesia: the case of local government." *Pacific Accounting Review* 24 (3): 262– 91. <https://doi.org/10.1108/01140581211283878>.
- Hariyadi, B. 2002. "Pengaruh kebijakan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah (Suatu kajian empiris di Propinsi Jawa Timur)." *Pusat Data Ekonomi & Bisnis* 5
- Hill, Carolyn J., dan Laurence E. Lynn. 2004. "Governance and Public Management, an Introduction." *Journal of Policy Analysis and Management* 23 (1): 3–11. <https://doi.org/10.1002/pam.10175>.
- Indra. 2016. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Lalolo Krina P, "indikator dan alat ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi" [Http//good.governance : Bappenas.go.id./informasi.Htm](http://good.governance : Bappenas.go.id./informasi.Htm), Sekretaris Good Public Governance. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press. Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset*, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset*, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Osborne, Stephen P. 2010. "Introduction - The (new) public governance: A suitable case for treatment?" In *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*, 1–16. London, UK: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>.

- Picur, Ronald D., dan Ahmed Riahi-Belkaoui. 2006. "The impact of bureaucracy, corruption and tax compliance." *Review of Accounting and Finance* 5 (2): 174– 80. <https://doi.org/10.1108/14757700610668985>.
- Patrick, Patricia A. 2007. "The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government." The Graduate School of Public Affairs The Pennsylvania State University.
- Siregar. (2011). *Penelitian Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar*
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. 2010. "Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)." Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Waluyo.2007. *Manajemen Publik (konsep,Aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : CV Mandar Maju.